

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Tinjauan atas Prosedur Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dinas PSDA merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Barat yang berperan dalam meningkatkan sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat.
2. Struktur Dinas PSDA Provinsi Sumbar sangat terlihat jelas, terlihat dari perkembangan aktivitasnya yang dikelola dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang teratur.
3. Prosedur Penyusunan Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Sumbar sudah sesuai dan berpedoman kepada kebijakan yang disediakan pemerintah. Adapun Prosedur Penyusunan Anggaran Dinas PSDA Sumbar yaitu diajukan kegiatan oleh masing – masing bidang yang sesuai dengan hasil Musrenbang yang diadakan dengan masyarakat, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rancangan Renja yang telah dibahas dan disetujui pada forum SKPD, lalu dilakukan penyempurnaan dan penetapan Renja yang disebut Rencana Program, setelah itu dibuat KUA dan PPAS untuk penetapan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah

dan diserahkan kepada TAPD dan Tim Banggar. Setelah KUA dan PPAS diverifikasi, disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA, RKA yang dibuat disampaikan kepada TAPD untuk diperiksa kesesuaiannya dengan Surat Edaran Kepala Daerah, setelah di verifikasi oleh TAPD yang terdiri dari Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, RKA yang telah sesuai kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA berisi rincian kegiatan yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), setelah itu baru DPA dapat digunakan untuk belanja dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan usulan didalam DPA.

4. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas PSDA Provinsi Sumbar dalam proses pelaksanaan penyusunan anggaran adalah alokasi anggaran yang terbatas, waktu yang singkat atau pendek dalam penginputan atau pengentryan data anggaran, dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang mengusulkan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah disusun oleh Dinas PSDA Provinsi Sumbar.
5. Pencapaian anggaran belanja Dinas PSDA Provinsi Sumbar tahun 2013 adalah sebesar 93,63%. Kegiatan secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dengan presentase penyerapan dana APBD diatas 90%. Namun dari 147 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 28 kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90%, dan dari 28 kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang terhambat dengan realisasi keuangan dibawah 50%.

6. Pencapaian anggaran belanja Dinas PSDA Provinsi Sumbar tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013, yaitu pencapaiannya sebesar 93,87%. Kegiatan secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dengan presentase penyerapan dana APBD diatas 90%. Namun dari 145 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 22 kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90%, dan dari 22 kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang terhambat dengan realisasi keuangan dibawah 50%. Pada tahun 2014 ini juga terdapat 1 kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan konstruksinya sampai selesai.
7. Pencapaian anggaran belanja Dinas PSDA Provinsi Sumbar tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan juga tahun 2013, yaitu pencapaiannya sebesar 95,76%. Kegiatan secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dengan presentase penyerapan dana APBD diatas 90%. Namun dari 204 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 15 kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90%, dan dari 15 kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang terhambat dengan realisasi keuangan dibawah 50%. Pada tahun 2015 ini juga terdapat 1 kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan konstruksinya sampai selesai.
8. Presentase perbandingan realisasi belanja dengan anggaran pada Tahun 2013 sebesar 93,63%, pada Tahun 2014 sebesar 93,87%, dan pada Tahun 2015 sebesar 95,76%, berdasarkan dari presentase tersebut terlihat bahwa Penyerapan dana APBD pada tahun anggaran 2013-2015 oleh Dinas PSDA Provinsi Sumbar semakin meningkat dan secara umum berada dalam posisi baik. Namun harus terus

dilakukan peningkatan kinerja dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan sebaik mungkin.

#### **4.2. Saran**

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang akan diajukan yang diharapkan dapat berguna bagi Dinas PSDA Provinsi Sumbar dimasa yang akan datang. Diharapkan kepada Dinas PSDA Provinsi Sumbar agar dapat memaksimalkan lagi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah agar menjadi lebih baik dalam pengelolaan sumber daya air di Sumatera Barat dimasa yang akan datang. Kemudian, PT. Bank Nagari sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan dalam menyeleksi dan memilih penyedia jasa (konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor), Pemilihan penyedia jasa harus diprioritaskan kepada penyedia jasa yang mempunyai kinerja yang baik dan bisa menyelesaikan tugas dan kontrak yang telah disepakati agar bisa mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

